

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis keuangan yang diikuti krisis perbankan pada pertengahan tahun 1997 menyebabkan terjadinya devaluasi nilai rupiah, tingkat suku bunga yang sangat tinggi, dan melonjaknya tingkat inflasi yang pada akhirnya memberi dampak sangat buruk pada sektor perbankan nasional. Beberapa indikator kunci perbankan dalam tahun 1998 berada pada kondisi yang sangat buruk. *Non Performing Loan* (NPL) bank-bank komersial mencapai 50 persen, tingkat keuntungan industri perbankan berada pada titik minus 18 persen, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan kondisi minus 15 persen (Febryani dan Rahadian, 2003). Perbankan nasional mengalami berbagai kesulitan antara lain pembengkakan nilai dan pembayaran hutang luar negeri, melonjaknya *non performing loan* (NPL), *negatif spread*, menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah besar dan lain-lain. Sebagian besar bank-bank nasional (khususnya bank swasta) merupakan bank bermasalah, yang satu persatu masuk kandang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Terpuruknya sektor perbankan akibat krisis ekonomi memaksa pemerintah melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak layak lagi untuk beroperasi. Beberapa bank swasta terpaksa dilikuidasi pada masa awal krisis ekonomi dan keuangan melanda Indonesia. Hal ini mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap industri perbankan di Indonesia (khususnya bank-bank swasta) sehingga terjadilah penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan (*bank runs*) secara serempak dalam jumlah yang sangat signifikan (Dendawijaya: 2003).

Meski beberapa analisis menyatakan bahwa krisis keuangan selalu didahului oleh fluktuasi dan ketidakstabilan makroekonomi yang menyebabkan terdepresinya mata uang domestik secara signifikan serta menyulut tingginya tingkat bunga dan inflasi yang berujung pada krisis perbankan, beberapa analisis lain berpendapat bahwa ketidakstabilan makroekonomi justru disebabkan lemahnya sistem perbankan. Peristiwa likuidasi puluhan bank merupakan peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan kepanikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembenahan di sektor perbankan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat dipandang sebagai suatu hal yang mendesak. Sebab, sekali kepercayaan masyarakat hilang, maka dunia perbankan Indonesia akan mengalami krisis yang berkepanjangan dan akan mengancam kondisi perekonomian di Indonesia.

Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus guna menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*Blanket Guarantee*). Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. *Blanket Guarantee* dapat dikatakan berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang sempat hilang akibat adanya krisis moneter. Pemberian jaminan ini ditandakan dengan didirikannya Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN) yang berakhir tugasnya pada Februari 2004 dan pada September 2005 digantikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Meskipun pemerintah sudah memberikan jaminan terhadap simpanan masyarakat, hal itu tidak merubah persepsi sebagian besar masyarakat mengenai keamanan menginvestasikan dana yang mereka miliki. Namun kenyataannya, sebagian besar masyarakat (khususnya masyarakat pedesaan) merasa lebih aman menyimpan atau menginvestasikan dananya di

bank pemerintah dibandingkan menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank swasta.

Hal ini dapat dibuktikan dari tabel di bawah ini:

Tabel 1: Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Pemerintah dan Bank Swasta 2008

NO	BANK	Dana Pihak Ketiga
1	BNI (Persero) Tbk.	163.164.358
2	BRI (Persero) Tbk.	201.537.439
3	Mandiri (Persero) Tbk.	289.112.052
4	BCA Tbk.	209.528.921
5	BII Tbk.	43.525.226
6	Bumiputera Indonesia Tbk.	5.280.392
7	Danamon Indonesia Tbk.	73.969.078
8	Eksekutif Internasional Tbk.	1.322.718
9	Kesawan Tbk.	1.992.060
10	Mayapada Internasional Tbk.	3.971.875
11	Mega Tbk.	29.381.005
12	Nusantara Parahyangan Tbk.	3.294.753
13	OCBC NISP Tbk.	27.123.471
14	PAN Indonesia Tbk.	46.043.679
15	Permata Tbk.	42.768.849
16	Swadesi Tbk.	1.053.812
17	Victoria Internasional Tbk.	4.093.417

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank tahun 2008 (dalam jutaan rupiah).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar dana masyarakat dipercayakan pada bank pemerintah. Perbedaan jumlah Dana Pihak Ketiga antara bank pemerintah dan bank swasta sangatlah jauh berbeda, hanya bank BCA yang memiliki kemampuan sebanding dengan bank pemerintah dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga. Padahal perbedaan antara bank pemerintah dan bank swasta hanya terletak pada segi kepemilikannya. Bank pemerintah merupakan bank yang pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sedangkan bank swasta merupakan bank yang pendirian dan modalnya dimiliki swasta. Baik menabung di bank pemerintah ataupun menabung di bank swasta, sebenarnya sama-sama aman karena dana masyarakat yang disimpan di bank di bawah dua miliar rupiah dijamin oleh LPS. Agar bank pemerintah dan bank swasta dapat terus tumbuh dan berkembang, tentu

keduanya harus mempunyai kinerja keuangan yang baik sehingga dana masyarakat yang telah dipercayakan tidak disalahgunakan.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan saat ini, informasi mengenai kinerja keuangan perbankan semakin dibutuhkan dan semakin penting. Salah satu upaya untuk membantu para pelaku bisnis dalam menilai kondisi keuangan suatu perusahaan (begitu juga perbankan) yaitu dengan melakukan analisis laporan keuangan. Adapun informasi yang tersaji antara lain mencakup informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran kas perusahaan dan informasi lainnya yang terkait dengan laporan keuangan. Untuk memahami laporan tersebut dilakukan analisis laporan keuangan yang meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan.

Sofiani (2008), yang meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan bank pemerintah dan bank swasta menyimpulkan secara garis besar tidak ada perbedaan kinerja antara bank pemerintah dan bank swasta, hanya rasio LDR yang berbeda yang mana LDR bank swasta lebih baik dari pada LDR pemerintah. Namun berbeda dengan hasil penelitian Vandy (2008), peneliti menyimpulkan ada perbedaan kinerja yang signifikan antara bank pemerintah dan bank swasta yang mana kinerja bank pemerintah lebih baik daripada bank swasta. Perbedaan kedua hasil penelitian tersebut wajar karena periode penelitian dan alat analisis yang mereka gunakan juga berbeda.

Karena jangka periode pengamatan kedua penelitian sebelumnya hanya selama tiga tahun dan karena adanya perbedaan kesimpulan kedua penelitian sebelumnya maka penulis tertarik mengangkat masalah kinerja bank pemerintah dan bank swasta dengan periode yang lebih lama yaitu delapan tahun (2003-2009) untuk memperoleh bukti empirik dan hasil penelitian yang lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA BANK PEMERINTAH DAN BANK SWASTA DENGAN PENDEKATAN EFISIENSI”.

1.2 Permasalahan dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) bank pemerintah lebih baik dari pada Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) bank swasta.
- b. Apakah *Net Interest Margin* (NIM) bank pemerintah lebih baik dari pada *Net Interest Margin* (NIM) bank swasta.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat memberikan manfaat maka peneliti memusatkan permasalahan pada penelitian ini dengan batasan dan ruang lingkup penelitian. Permasalahan dalam penelitian ini dipusatkan pada bank pemerintah dan bank swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangannya (periode 2003-2009) secara konsisten, masuk daftar sepuluh bank besar per 31 Desember 2009 yang pengklasifikasiannya berdasarkan total aset, serta bank-bank tersebut tidak melakukan *merger* pada periode pengamatan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara bank pemerintah dan bank swasta tahun 2003-2009 melalui pendekatan efisiensi dengan rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Net Interest Margin* (NIM).

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada banyak pihak diantaranya:

- a) Bagi pemilik dana/ investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan keputusan dalam menanamkan investasinya pada bank yang bersangkutan.
- b) Bagi bank yang diteliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan manajerial yang berhubungan dengan peningkatan efisiensi kinerja perusahaan.
- c) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi mengenai kinerja keuangan perbankan saat ini.
- d) Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini merupakan penerapan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama kuliah ke dalam dunia penelitian.
- e) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.